



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas pokok dan fungsi serta tertib administrasi Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019, perlu penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda);
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa hasil Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
 - c. bahwa sehubungan hal sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b keputusan ini, serta hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tanggal 5 November 2018, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Seri No. HIY-250682-SP

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 06 Tahun 2017 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

- KETIGA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemerintah Kabupaten Brebes dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Propemperda sebagaimana tersebut Diktum KESATU dalam hal:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memaksakan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani legislasi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;
 - d. akibat pembatalan oleh Gubernur Jawa Tengah;
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
- KEEMPAT : Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Pemerintah Kabupaten Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 5 November 2018

KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES



ILLIA AMIN

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 BREBES
 NOMOR : 12 TAHUN 2018
 TANGGAL : 5 NOVEMBER 2018

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KET.
1.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018	
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019	
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020	
4.	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	
5.	Penyelenggaraan Perizinan	
6.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
7.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
8.	Penyelenggaraan Metrologi Legal / Tera Ulang	
9.	Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten Brebes	
10.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes pada Perusda Percetakan Kabupaten Brebes	
11.	Resi Gudang	
12.	Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	
13.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	
14.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	
15.	Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat II Brebes Nomor 1 Tahun 1991 tentang Ijin Tempat Usaha	
16.	Penyelenggaraan Penanaman Modal	
17.	Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes	
18.	Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
19.	Penyelenggaraan Perpustakaan	
20.	Penyelenggaraan Kearsipan	
21.	Perusahaan Umum Daerah Percetakan Kabupaten Brebes	
22.	Perusahaan Umum Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Kabupaten Brebes	
23.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes	

24.	Perlindungan Konsumen	
25.	Kepemudaan	
26.	Garis Sempadan	
27.	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	
28.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	
29.	Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Brebes	
30.	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	
31.	Perubahan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Brebes	
32.	Perubahan Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Brebes	
33.	Koperasi dan UMKM di Kabupaten Brebes	

KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES



ILLIA AMIN